

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Berdasarkan perkembangan inflasi daerah pada triwulan ke III tahun 2025 kabupaten rokan hulu mengalami kenaikan dari triwulan dari sebelumnya. harga barang kebutuhan pokok dan barang pentingnya mengalami perubahan dari hari ke hari dan berbeda dari pasar ke pasar lainnya. perbandingan harga komoditas pangan rokan hulu pada triwulan ke III :

Berdasarkan hasil pantauan harga kebutuhan pokok pada triwulan ke III tahun 2025 ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga yang signifikan. berikut hasil pantauan harga kebutuhan pokok dipasar modern :

1. Beras premium mengalami kenaikan harga karena pasokan dari luar daerah yang belum stabil dan distribusi beras belum merata, pada bulan juli Rp14.031/kg bulan agustus Rp14.636/kg, september Rp16.636/kg.
2. Minyak goreng pada bulan juli Rp20.854/kg, agustus Rp20.982/kg, september Rp20.982/kg.
3. Daging ayam pada juli Rp26.797/kg, agustus Rp27.899/kg, bulan september 27.899/kg.
4. Cabe merah pada bulan juli Rp47.994/kg, bulan agustus Rp42.840/kg, bulan september Rp42.840/kg.
5. Telur ayam, tidak mengalami kenaikan harga (stabil) pada bulan juli Rp29.653/kg, bulan agustus Rp28.638/kg, bulan september Rp28.638/kg.
6. Cabe rawit mengalami kenaikan pada bulan juli Rp46.506/kg, bulan agustus Rp48.061/kg, bulan september Rp48.061/kg.
7. Gula pasir pada bulan juli Rp37.730/kg, bulan agustus Rp36.003/kg, bulan september Rp36.003/kg.
8. Bawang putih pada bulan juli Rp37.730/kg, bulan agustus Rp36.003/kg, september Rp36.003/kg.
9. Daging sapi pada bulan juli Rp150.000/kg, bulan agustus 154.900/kg, bulan september Rp154.900/kg.
10. Bawang merah pada bulan juli Rp26.410/kg, bulan agustus Rp24.213/kg, bulan september Rp24.213/kg.

Kenaikan harga bahan kebutuhan pokok yang tidak stabil menyebabkan keresahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Untuk menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi ada beberapa permasalahan yang masih di hadapi pada triwulan III antara lain :

### 1. Ketergantungan pasokan antar daerah

Banyak daerah masih bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah sehingga rentan terhadap gangguan distribusi harga di daerah contoh harga cabe dan bawang merah di daerah non sentral produksi sering melonjak saat pasokan terganggu.

2. Distribusi dan infrastruktur logistik terbatas misalnya jalan rusak, minimnya armada angkut, kurangnya fasilitas penyimpanan menyebabkan distribusi komoditas yang tidak efisien.

### 3. Koordinasi lintas instansi belum optimal

TPID belum sepenuhnya terintegrasi dengan dinas terkait.

### 4. Keterbatasan data dan sistem pemantauan

Sistem pemantauan harga belum real time dan belum mencakup seluruh pasar tradisional, validasi data lapangan masih manual dan tidak seragam antar kecamatan.

5. Minimnya cadangan pangan daerah, belum semua daerah memiliki cadangan pangan strategis yang siap digunakan saat terjadi lonjakan harga, mekanisme distribusi darurat belum terstruktur dengan baik.

### 7. Keterbatasan anggaran

Dana untuk operasi pasar, subsidi transportasi, pasar murah sering terbatas. intervensi harga menjadi tidak konsisten.

## 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Ada beberapa langkah strategi pada pelaksanaan triwulan ke III sebagai berikut :

1. Menyusun daftar komoditas prioritas berdasarkan kontribusi terhadap inflasi dan tingkat konsumsi masyarakat.

2. Pemantauan harga dan stok secara berkala dalam melaksanakan pantauan harga mingguan dan bulanan melalui sistem digital seperti E-Sembako atau Dashboard harga daerah, langkah nyata petugas lapangan mencatat harga di pasar tradisional dan modern lalu menginput ke sistem pusat untuk dianalisis tren.

### 3. Operasi pasar dan pasar murah

Ketika terjadi lonjakan harga TPID menggelar operasi pasar dan pasar murah untuk menstabilkan harga dan menjaga daya masyarakat. langkah nyata bekerja sama dengan BULOG, Distributor dan Disperindag untuk menyediakan komoditas dengan harga terjangkau.

### 4. Koordinasi lintas Instansi

TPID melibatkan dinas pertanian, dinas perindag, dinas ketahanan pangan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dengan mengikuti rakor TPID secara rutin setiap minggunya.

5. Edukasi konsumen dan kampanye bijak dengan langkah nyata sosialisasi melalui media sosial, penyuluhan dipasar.

6. Penguatan infrastruktur distribusi

TPID mendukung jalan distribusi dan logistik agar pasokan komoditas tidak terhambat. langkah nyata fasilitasi transportasi komoditas dari sentra produksi ke pasar melalui subsidi angkutan.

#### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi pada triwulan ke III tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pasar murah dan operasi pasar

Tujuannya menekan harga komoditas pangan strategis di wilayah rawan inflasi.

2. Pemantauan harga dan stok komoditas

Tujuannya mendeteksi dini lonjakan harga dan kelangkaan barang, evaluasi dengan sistem E-sembako membantu pelaporan harga harian secara digital, validasi data lapangan masih terbatas menyebabkan keterlambatan respon masyarakat, perlu pelatihan petugas dan integrasi data antar OPD.

3. Koordinasi lintas instansi

Tujuan menyatukan langkah TPID, dengan OPD terkait.

4. Perlu kerjasama lebih erat dengan BULOG dan petani lokal untuk stok.

5. Edukasi konsumen

Kampanye edukasi masih terbatas pada media sosial

#### 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa rekomendasi kebijakan untuk triwulan ke III tahun 2025 :

1. Penguatan cadangan pangan daerah dan menyalin kerjasama dengan BULOG dan petani lokal untuk penyediaan stok.

2. Optimalisasi pasar murah dan operasi pasar dengan menjadwalkan pasar murah secara berkala di kecamatan serta menyediakan paket sembako bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

3. Digitalisasi pemantauan harga

Dengan aplikasi E-semabako untuk pelaporan harga harian dan mendorong partisipasi masyarakat dan pedagang dalam pelaporan harga

4. Peningkatan infrastruktur distribusi perbaikan akses jalan ke sentra produksi dan pasar tradisional serta penyediaan logistik untuk mendukung kelancaran distribusi bahan pokok.

5. Koordinasi lintas OPD dan stakeholder.